



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

EDISI XX

Periode 12 – 23 Juli 2021

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

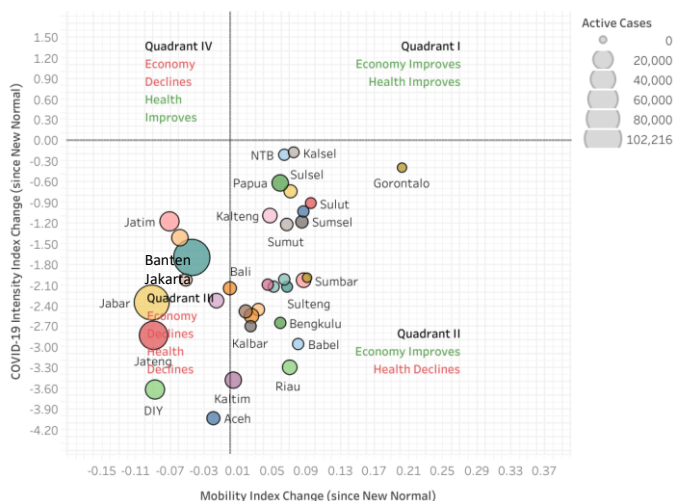


Astera Primanto Bhakti • Harry Z. Soeratin • Putut Hari Satyaka • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Amrul Yusroni • Yadi Hadian • Jackwin Simbolon • Mulyono • Kurnia • Radies Kusprihanto Purbo • Miftah Chalamsa
Adrian Prama Pratama • Purwandi Santoso • Arifudin Miftakhul Huda • Mario Agustino • Eko Arisyanto • Britany Alasen Sembiring
Desy Pujipta A • Nabillah Rahma • Nadia Nurul Nisa • Narits Muhammad Syafruddin • Selma Syifa Khoirunnisa • Khishbatur Rizqiyah



KINERJA PEREKONOMIAN DAERAH

Aktivitas Perekonomian Berdasarkan Mobility Index

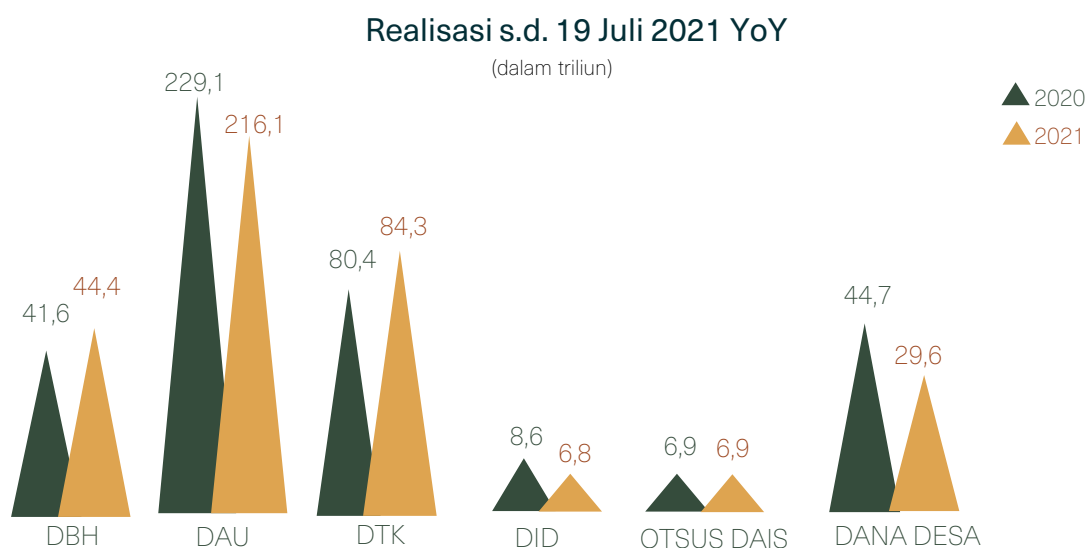


- Aktivitas perekonomian, berdasarkan mobility index*, terus mengalami penurunan dalam jangka waktu 23 Juni sampai dengan 11 Juli 2021, yaitu dari -0,070 menjadi -0,177.
- Berdasarkan analisis kuadran dengan menggunakan variabel *mobility index* dan COVID-19 intensity index change per 10 Juli 2021, terlihat wilayah Jawa semua masuk ke Kuadran III yang menandakan adanya perlambatan aktivitas. Sudah tidak ada wilayah yang mengalami perbaikan kondisi kesehatan, meskipun sebagian wilayah masih menunjukkan adanya perbaikan di sisi aktivitas ekonomi yang ditandai dengan masih positifnya perubahan mobility index.

► *Data CSIS

KINERJA TKDD DAERAH

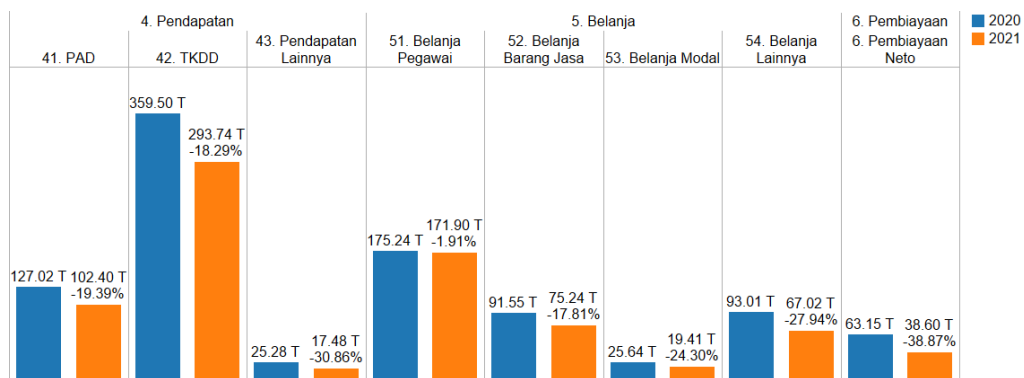
Realisasi TKDD 2021 s.d. 19 Juli 2021



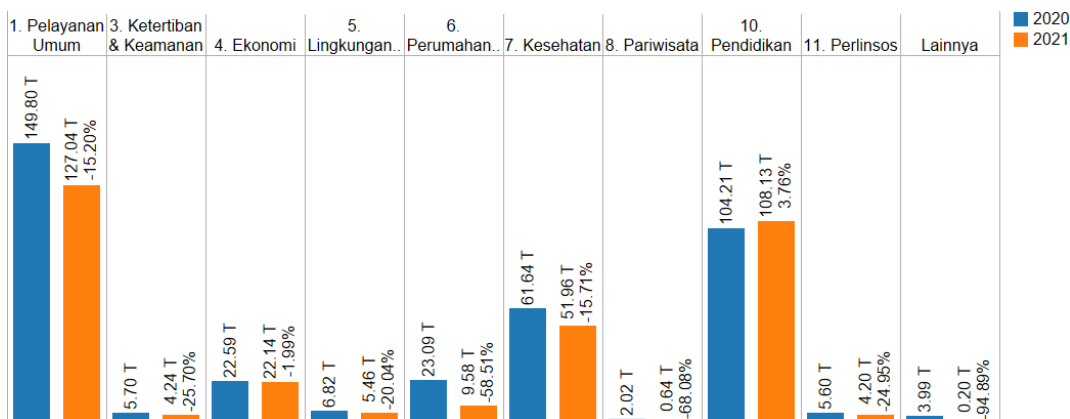
- Secara YoY, realisasi TKDD s.d. 19 Juli 2021 sebesar Rp388,2 T mengalami penurunan 5,6% dibandingkan realisasi s.d. 19 Juli 2020 sebesar Rp411,3 T.
- DAU mengalami penurunan sebesar 5,7% akibat adanya penambahan persyaratan kinerja mulai DAU Februari 2021. Sedangkan DBH mengalami kenaikan sebesar 6,72%, DTK naik 4,9%, dan Dana Desa menurun sebesar 33,6%.
- Realisasi BLT sebesar Rp 4.998,35 M kepada 223.641 Desa.

KINERJA FISKAL DAERAH

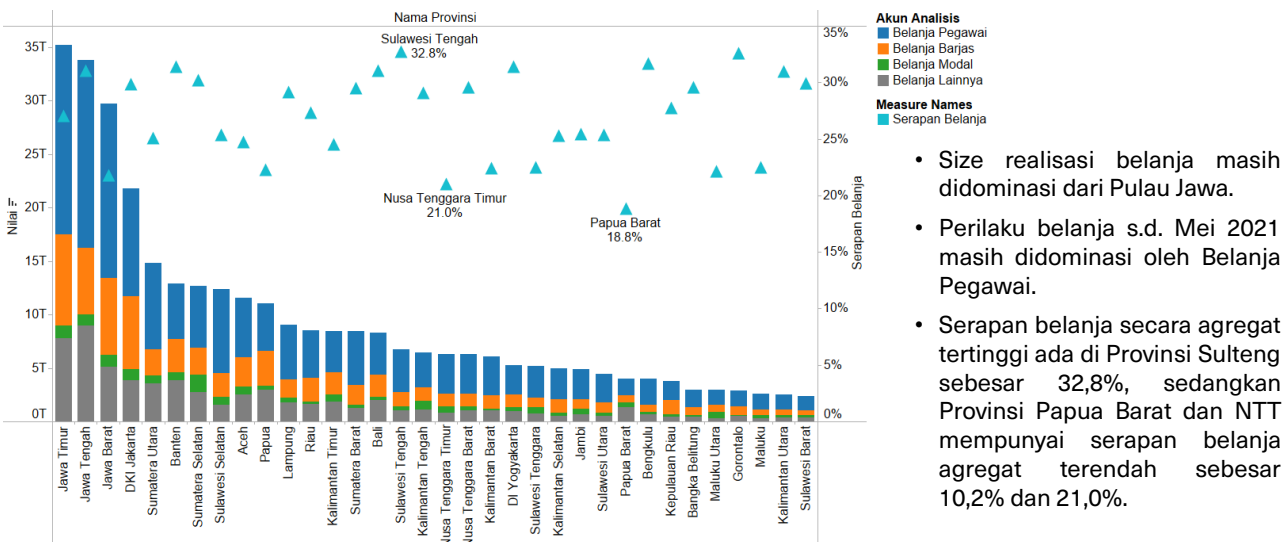
Realisasi APBD s.d. Juni 2021 – YoY



- Realisasi Pendapatan 2021 terkontraksi sebesar 18,9% secara YoY dari Rp508,4 T menjadi Rp412,3 T. Penurunan terjadi di PAD sebesar 19,4% yang salah satunya disebabkan karena penurunan Pajak Daerah sebesar 13,7%.
- Realisasi Belanja 2021 terkontraksi sebesar 13,3% secara YoY dari Rp383,5 T menjadi Rp332,4 T, dengan penurunan tertinggi di Belanja Lainnya sebesar 27,9%, diikuti dengan Belanja Modal turun 24,3% dan Belanja Barjas turun 17,8%.
- Pembiayaan Neto turun sebesar 38,9% secara YoY yang sumber utamanya adalah penurunan di Penggunaan SILPA TA Sebelumnya sebesar 39,4% dari Rp64,9 T menjadi Rp39,2 T, sedangkan Penerimaan Pinjaman justru naik sebesar 191,0% dari Rp0,9 T menjadi Rp2,6 T.



- Fungsi yang mengalami penurunan realisasi terbesar adalah Pariwisata sebesar 68,1% dan Perumahan & Fasum sebesar 58,5%.
- Fungsi Pendidikan dan Ekonomi relatif terjaga realisasinya, yaitu berturut-turut naik 3,8% dan turun 2,0%.



- Size realisasi belanja masih didominasi dari Pulau Jawa.
- Perilaku belanja s.d. Mei 2021 masih didominasi oleh Belanja Pegawai.
- Serapan belanja secara agregat tertinggi ada di Provinsi Sulteng sebesar 32,8%, sedangkan Provinsi Papua Barat dan NTT mempunyai serapan belanja agregat terendah sebesar 10,2% dan 21,0%.

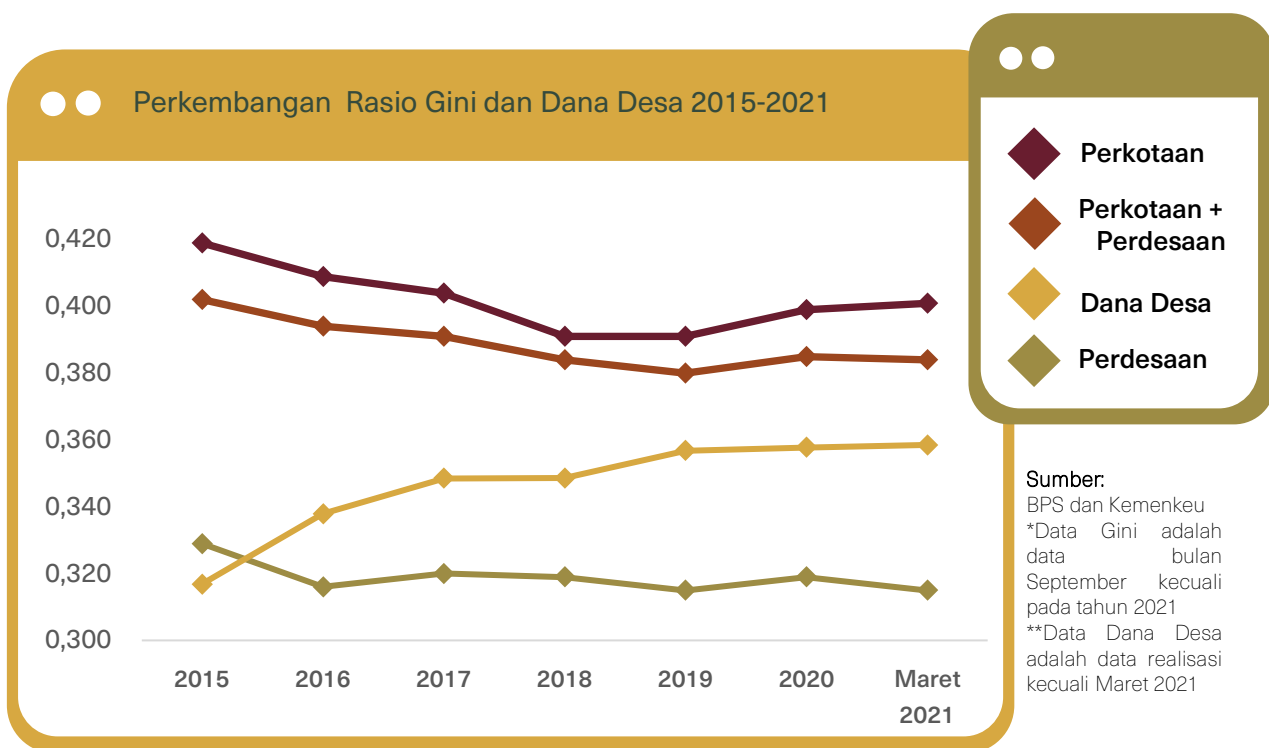
*Realisasi 2021 bersifat sementara dari 529 Pemda yang sudah menyampaikan data ke SIKD per 16 Juli 2021

KINERJA DAERAH

KETIMPANGAN

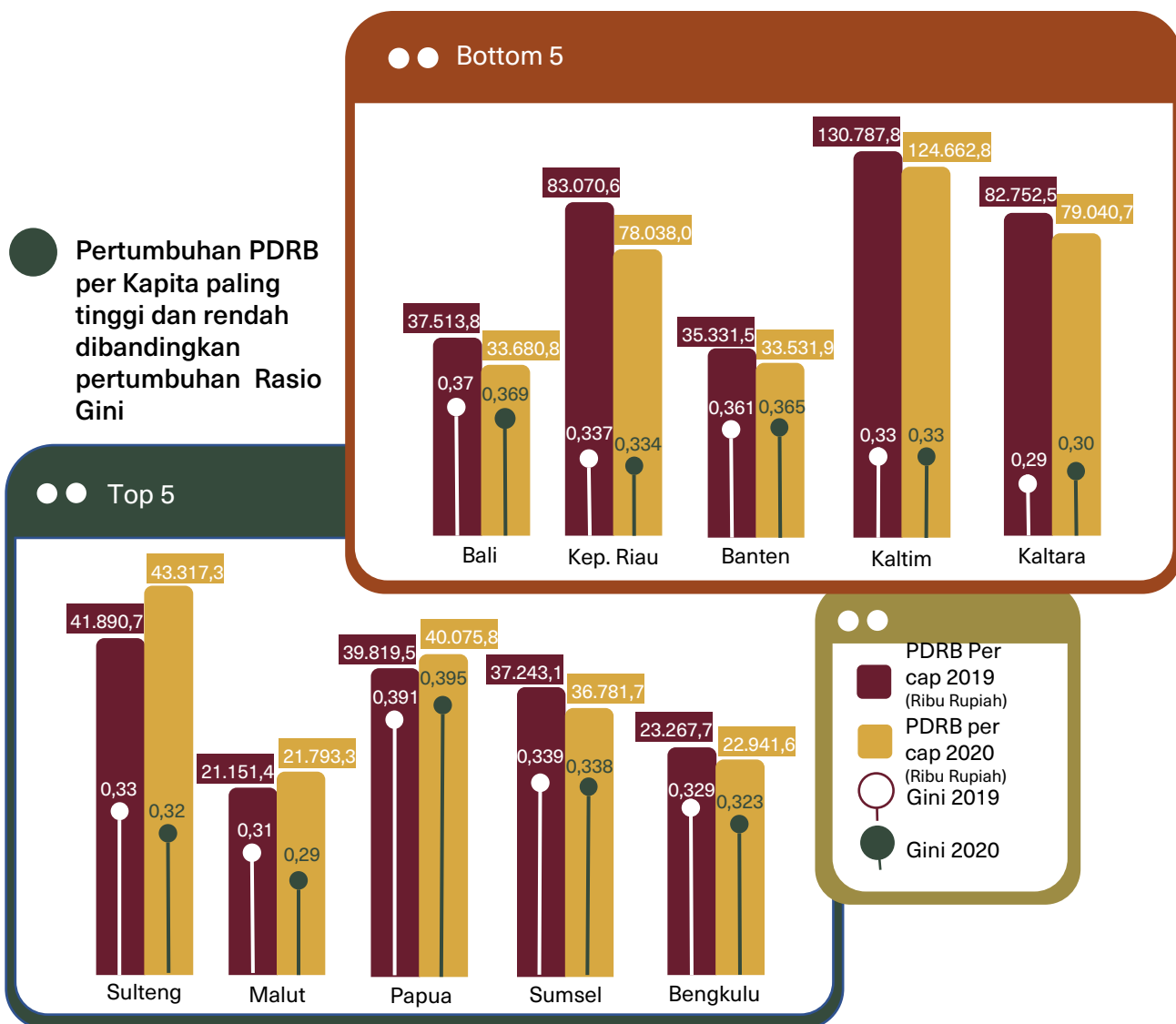
Secara nasional, sejak Tahun 2015 angka Rasio Gini mengalami penurunan sampai dengan 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Indonesia. Namun demikian, akibat adanya pandemi Covid-19, nilai Rasio Gini kembali mengalami kenaikan pada Maret 2020 dan September 2020 lalu kembali mengalami penurunan pada Maret 2021. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di perkotaan pada Maret 2021 adalah sebesar 0,401. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,399. Untuk daerah perdesaan, Rasio Gini pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,315, turun dibandingkan dengan kondisi September 2020. Rasio Gini di daerah perdesaan pada September 2020 dan Maret 2021 masing-masing tercatat sebesar 0,319 dan 0,317.

Trend penurunan Rasio Gini di perdesaan seiring dengan kenaikan realisasi anggaran Dana Desa setiap tahunnya yang dikucurkan oleh Pemerintah. Hal ini menunjukkan indikasi awal bahwa Dana Desa dapat menekan ketimpangan di daerah perdesaan. Perlu kajian lebih lanjut untuk mengukur dampak penurunan pendapatan tersebut.



Secara nasional, Rasio Gini mengalami kenaikan dari Tahun 2019 ke 2020. Sebaliknya, pertumbuhan PDRB per Kapita mengalami pertumbuhan negatif dari Tahun 2019 ke 2020. Masih terdapat tiga provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB positif pada Tahun 2020 yakni Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua, sedangkan 31 provinsi lainnya mengalami pertumbuhan PDRB negatif. Data secara nasional menunjukkan indikasi awal bahwa penurunan pendapatan masyarakat tersebut terjadi di kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah sehingga memperlebar ketimpangan antara kelompok masyarakat kelas atas dan bawah, namun secara individu masing-masing provinsi, belum terdapat pola yang konsisten hubungan antara Rasio Gini dan laju pertumbuhan PDRB. Perlu kajian lebih lanjut untuk mengukur hubungan dan dampak penurunan pendapatan tersebut.

KINERJA DAERAH



Selain dari sisi antar kelompok pendapatan, ketimpangan juga terjadi secara spasial. *Overall*, ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74 persen (y-on-y). Kontraksi tersebut dirasakan berbeda antar wilayah, meski masih ada wilayah yang mencatatkan angka positif, yakni Sulawesi, Maluku, dan Papua. Namun demikian, hal tersebut tidak cukup kuat untuk mengubah wajah ketimpangan spasial nasional, yang masih didominasi oleh Jawa dan Sumatera.

No	Kelompok Provinsi	Distribusi PDB (ADHB) Triwulan 1	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1 (y-on-y)
1	Sumatera	21,54%	-0,86%
2	Jawa	58,70%	-0,83%
3	Bali & Nusa Tenggara	2,75%	-5,16%
4	Kalimantan	8,05%	-2,23%
5	Sulawesi	6,52%	1,20%
6	Maluku & Papua	2,44%	8,97%

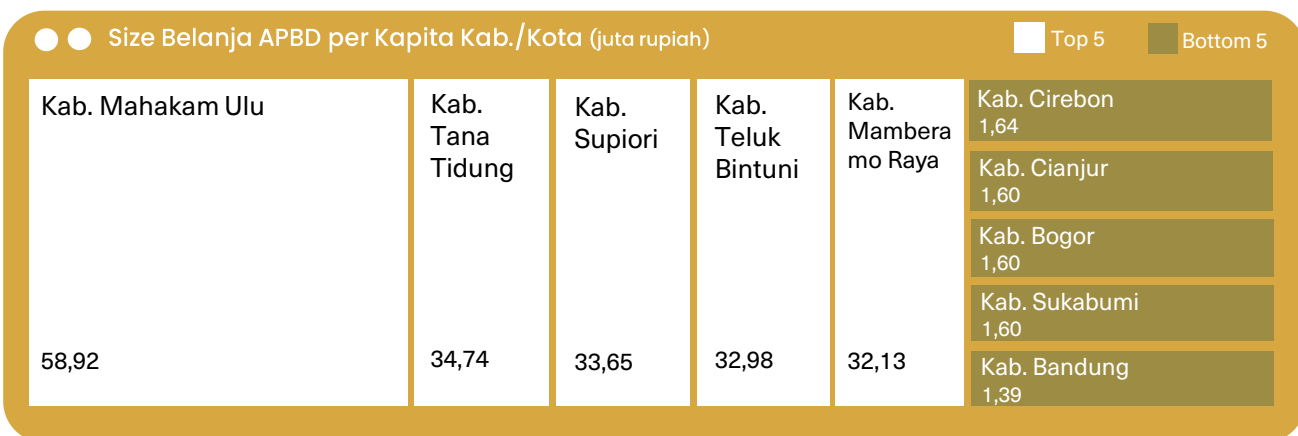
Sumber: BPS - diolah

KINERJA DAERAH

Pada sisi lain, ketimpangan kemampuan Pemda dalam pendanaan pelaksanaan pemerintahan di daerah semakin kecil dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari perbaikan indeks ketimpangan antarwilayah baik dengan Indeks Williamson maupun Indeks Theil seperti pada grafik dibawah ini. Adapun adanya pandemi Covid-19 tidak terlalu banyak mempengaruhi tingkat ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah di level nasional.



Namun demikian, jika hanya dilihat dari titik tertinggi dan terendahnya, maka masih terlihat *gap* yang memang masih perlu diperbaiki di masa mendatang.

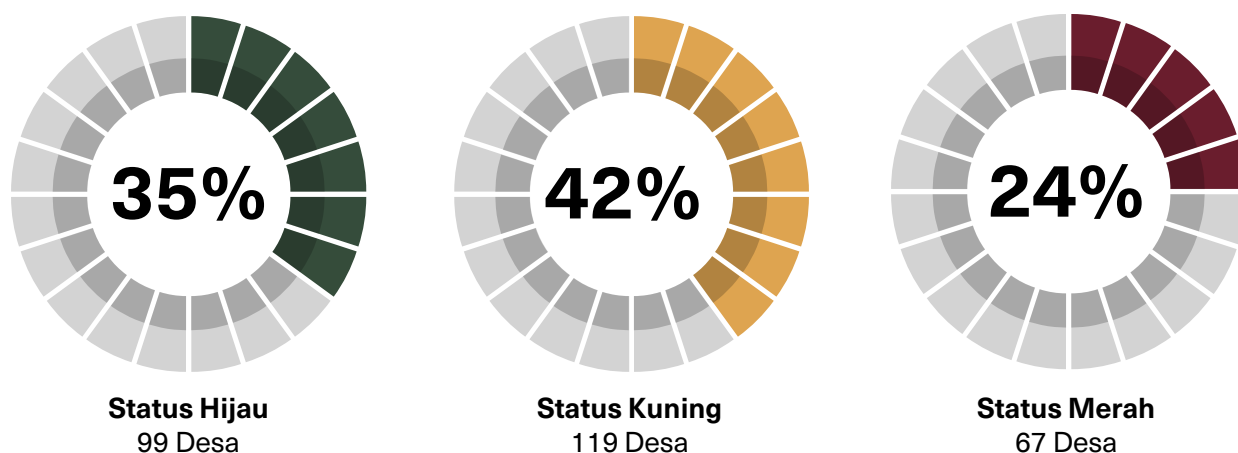


INOVASI DAERAH

Laboratorium Kemiskinan: Inovasi Kabupaten Pekalongan Pangkas Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah utama di Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, namun berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan masih dirasa belum optimal. Wilayah Kabupaten Pekalongan terbagi menjadi tiga tipologi yaitu daerah pesisir, perkotaan, dan pegunungan, dimana kemiskinan terjadi pada semua tipologi tersebut dengan karakteristik yang berbeda. Tercatat ada 99 desa berstatus hijau, 119 desa berstatus kuning, dan 67 desa berstatus merah (kemiskinan tinggi). Berangkat dari permasalahan tersebut, Pemkab Pekalongan mengembangkan Laboratorium Kemiskinan yang bertujuan untuk mengatasi persoalan kemiskinan secara terpadu, tepat program, tepat sasaran, serta tepat guna sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik warga miskin. Laboratorium Kemiskinan tersebut merupakan program inovasi pelayanan publik untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat Pekalongan dengan memperhatikan kearifan lokal. Laboratorium kemiskinan merupakan tempat untuk melakukan penelitian, pengelolaan, dan inovasi untuk program pengentasan kemiskinan. Formula untuk pengentasan kemiskinan disesuaikan dengan penyebab kemiskinan dan topografi masing-masing wilayah.

► Status Kemiskinan Desa di Kabupaten Pekalongan



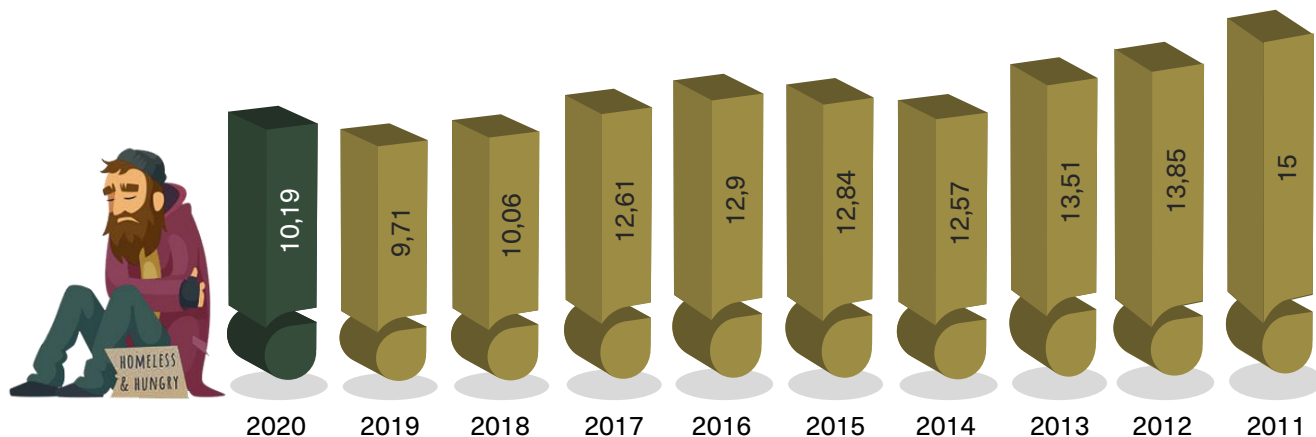
Inovasi laboratorium kemiskinan merupakan wujud implementasi pemerintah daerah dalam melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan basis data terpadu yang valid dan terverifikasi. Prinsip kerja program ini adalah melakukan pemotretan, pendataan, dan penanganan penduduk miskin. Laboratorium kemiskinan melakukan langkah cepat dalam mendata secara valid dari masyarakat miskin di perkotaan, buruh/nelayan miskin di pesisir pantai, dan para petani/ peladang miskin di hutan. Langkah berikutnya adalah memverifikasi secara faktual untuk memotret bagaimana kemiskinan yang terjadi, mulai dari nama, pekerjaan, serta faktor penyebab kemiskinannya. Selanjutnya, peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat dilakukan secara bertahap, melalui perbaikan program perlindungan sosial, perbaikan akses pelayanan dasar, dan memperluas pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dalam berbagai kegiatan pembangunan. Fokus utama program adalah perencanaan dan pengalokasian anggaran guna menekan angka kemiskinan dengan cara meningkatkan pendapatan berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dan menurunkan beban si miskin.

Pemkab Pekalongan ...

INOVASI DAERAH

Pemkab Pekalongan menggunakan metode campuran dalam penanganan kemiskinan, yaitu adanya ketelibatan antara pemerintah, perbankan, pengusaha, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat, dimana pemerintah menjadi inisiator dan fasilitator. Beberapa capaian program Laboratorium Kemiskinan di antaranya: penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), meningkatnya rumah tangga pengguna jamban, penanganan penduduk dengan penyakit kronis, dan kecacatan. Secara keseluruhan sasaran dari laboratorium kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, mampu mengentaskan sekitar 70 persen Warga Sasaran.

► Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Pekalongan



Program Laboratorium Kemiskinan yang diinisiasi Pemkab Pekalongan ini telah sukses masuk dalam kategori Top 45 Inovasi Pelayanan Publik, pada ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Nasional (KIPP) Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Program ini telah berhasil menciptakan akselerasi penurunan angka kemiskinan secara signifikan di Kabupaten Pekalongan, selama beberapa tahun terakhir. Pada 2011, persentase penduduk miskin di kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah itu masih tinggi 15 persen. Lima tahun kemudian, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun menjadi 12,9 persen dan bahkan pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan turun di bawah 10%, yaitu sebesar 9,71 persen.

► Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020

LAMPIRAN-I
KEPUTUSAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 192 TAHUN 2020
TENTANG TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TAHUN 2020
DAN 5 PEMENANG *OUTSTANDING ACHIEVEMENT OF
PUBLIC SERVICE INNOVATION* 2020

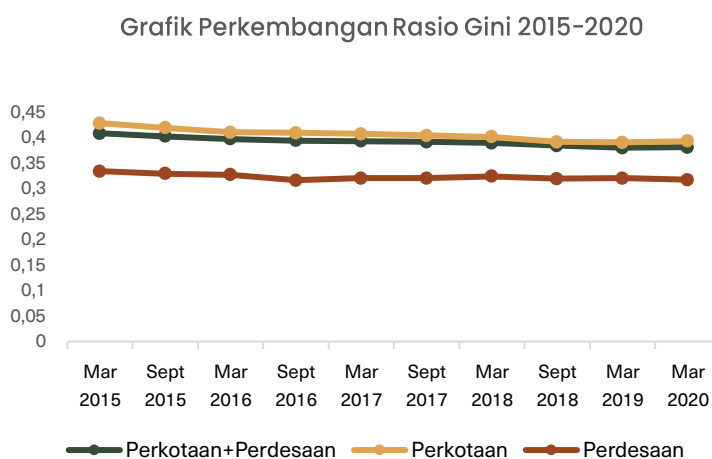
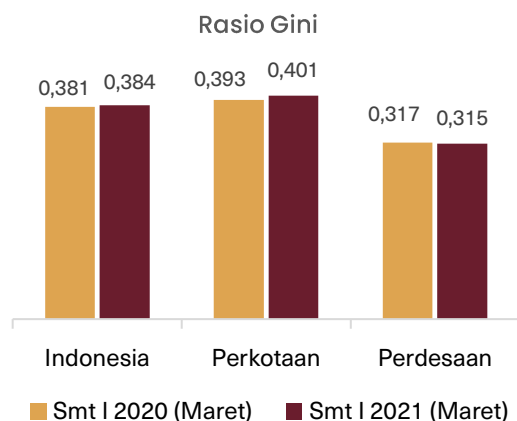
TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020

NO.	INSTANSI	JUDUL INOVASI	KATEGORI	UNIT PELAYANAN PUBLIK
36	Pemerintah Kabupaten Pekalongan	LABORATORIUM KEMISKINAN (Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal – Kabupaten Pekalongan)	Pengentasan kemiskinan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan

Ketimpangan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19

BPS telah mengeluarkan data terbaru ketimpangan di Indonesia **pada Maret 2021**. Ketimpangan tersebut dihitung berdasarkan Rasio Gini. Berdasarkan data BPS tersebut, tingkat **ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia adalah sebesar 0,384** atau naik sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Rasio Gini September 2020 yang sebesar 0,385. Namun, Rasio Gini meningkat sebesar 0,003 poin bisa dibandingkan dengan Rasio Gini Maret 2020 yang sebesar 0,381. Dengan demikian, **ketimpangan di Indonesia meningkat selama krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19**.

Ketimpangan ekonomi semakin meningkat dengan peningkatan ketimpangan terbesar terjadi di perkotaan dari 0,393 pada Maret 2020 menjadi sebesar 0,401 pada Maret 2021. Di sisi lain, ketimpangan ekonomi semakin menurun di perdesaan dari 0,317 pada Maret 2020 menjadi 0,315 pada Maret 2021. Ketimpangan ekonomi semakin membesar di perkotaan diperkirakan karena penduduk yang berpendapatan tinggi di perkotaan menahan belanja dan lebih banyak menyimpan uangnya di perbankan akibat adanya pandemi Covid-19, sedangkan penduduk pendapatan menengah ke bawah di perkotaan semakin berkurang pendapatannya. Meningkatnya ketimpangan di Indonesia dalam setahun terakhir telah mematahkan tren penurunan ketimpangan di Indonesia sejak tahun 2015 (lihat grafik perkembangan Rasio Gini).



► Ketimpangan Ekonomi: Krisis Moneter vs Covid-19

Apabila ketimpangan di Indonesia selama krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 dibandingkan dengan krisis ekonomi akibat krisis moneter terlihat adanya perbedaan dampak krisis ekonomi terhadap ketimpangan di Indonesia. Pada krisis ekonomi tahun 1998, krisis ekonomi justru menurunkan ketimpangan ekonomi Indonesia dari Rasio Gini sebesar 0,355 pada tahun 1996 turun cukup besar menjadi sebesar 0,308 pada tahun 1999. Dengan demikian **terjadi perbaikan ketimpangan ekonomi di Indonesia akibat krisis moneter**. Perbaikan ketimpangan tersebut diakibatkan oleh semakin berkurangnya penghasilan penduduk berpenghasilan tinggi akibat dari menurunnya nilai rupiah dan banyak perusahaan yang bangkrut.

Sementara itu, kalangan menengah bawah, misalnya penduduk menengah bawah yang bekerja di sektor UMKM masih bertahan sehingga penghasilannya tidak turun drastis. Perbedaan dampak krisis ekonomi tahun 1998 dengan krisis ekonomi tahun 2020 disebabkan oleh berbedanya penyebab krisis ekonomi. Krisis ekonomi akibat krisis kesehatan oleh wabah pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap semua penduduk, namun **dampak terbesar dialami oleh penduduk menengah ke bawah** yang penghasilannya berkurang karena menurunnya aktivitas ekonomi dengan adanya pembatasan mobilitas penduduk melalui PSBB dan PPKM.



Tantangan Menurunkan Ketimpangan Akibat Pandemi Covid-19

Semakin meningkatnya ketimpangan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19 dapat menimbulkan permasalahan. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah tentunya adalah **memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat** terutama kelas bawah supaya tetap bertahan, karena adanya kebijakan seperti PSBB dan PPKM telah menciptakan PHK dan likuidasi usaha dimana-mana dan banyak UMKM yang mengalami kesulitan dalam berusaha. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat bahwa 17,8% perusahaan melakukan PHK, 25,6% merumahkan pekerja, dan 10% melakukan keduanya. Hingga Desember 2020, BPS menyatakan bahwa ada tambahan jumlah pengangguran sebanyak 2,67 juta orang, sehingga angka pengangguran Indonesia menjadi 9,77 juta orang di tahun 2020.

► Paket Dukungan Ekonomi Pemerintah



161,2 T
Subsidi UMKM
dan Korporasi



187,8 T
Perlindungan Sosial



9,49 T
Diskon Tarif Listrik
(s.d. Desember 2021)

Namun demikian, tantangan terbesarnya adalah **bagaimana menyalurkan seluruh dana tersebut secara cepat dan tepat sasaran** sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat menerima bantuan tepat waktu sehingga dapat bertahan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Untuk BLT Dana Desa misalnya, penyaluran BLT Dana Desa mengalami kendala besar seperti terlambatnya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam mengajukan persyaratan penyaluran, adanya perubahan peraturan mengenai BLT Dana Desa baik di Kementerian Desa maupun di Kementerian Keuangan, ditambah lagi dengan persoalan pendataan dan teknis penyaluran dana tersebut. Hal ini juga terjadi pada paket kebijakan lainnya, dimana KPM (Kelompok Penerima Manfaat) tidak mengetahui nilai bantuan, cara memperoleh, dan berapa lama program tersebut berlaku. Selain itu, cara memberikan bantuan juga menjadi kendala, misalnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang menurut Permensos No. 20 tahun 2019 dapat digunakan untuk memilih barang di e-warong, namun kenyataannya paket pangan tersebut ditentukan oleh pelaksana program di e-warong tertentu dan hanya boleh melakukan pengambilan sebanyak satu kali.

Dari sisi dukungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan bahwa **8% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) digunakan untuk penanganan Covid-19 yang di dalamnya termasuk pemberian insentif untuk tenaga kesehatan**, dengan total anggaran sebesar Rp 33,8 triliun. Namun hingga Juli 2021, dana yang disalurkan hanya sebesar 8,22% atau Rp2,77 triliun. Semestinya semakin cepat dana ini disalurkan, maka akan semakin bertambah pula kemampuan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong perekonomian.

Rekomendasi

Krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, meskipun berkontribusi terhadap melebarnya ketimpangan, namun bisa jadi menjadi momentum untuk memperbaiki ketimpangan. Oleh karena itu, ketimpangan yang semakin melebar perlu menjadi fokus utama sejalan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu untuk terus diperkuat untuk mengurangi ketimpangan, antara lain perlunya mengatasi fundamental masalah ketimpangan yang ditimbulkan oleh Covid-19 melalui **peningkatan belanja pemerintah pada sektor-sektor yang mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**. Beberapa studi menunjukkan bahwa adanya program pendidikan gratis dan perluasan jaminan kesehatan masyarakat mampu berkontribusi signifikan dalam mengurangi kesenjangan. Pandemi Covid juga menunjukkan pentingnya perlindungan sosial yang kuat. Program *safety net* seperti Program Keluarga Harapan, Bansos Tunai, Kartu Sembako, program pra kerja dan BLT Desa mampu menjadi pondasi yang mampu menahan dampak ketimpangan yang semakin melebar. Dampak Covid-19 ini dapat terasa sampai beberapa tahun ke depan meskipun pandemi berakhir. Dengan demikian, program seperti BLT desa perlu tetap dipertahankan dalam jangka menengah.

Selanjutnya, penguatan belanja sektor esensial dan jaring pengaman sosial tentunya merupakan sebuah *cost* yang harus dipenuhi oleh Pemerintah. Oleh karena itu, mengatasi ketimpangan juga memerlukan **reform/penguatan pada aspek penerimaan** agar dapat mendukung program-program yang bersifat *counter cyclical* tersebut. Dalam hal ini reformasi perpajakan perlu menjadi salah satu alat agar mampu menopang kebutuhan tersebut. Beberapa strategi seperti penerapan multi tarif pajak, penyesuaian pemberian insentif perpajakan terutama bagi UKM, dan instrument pencegahan penghindaran pajak perlu segera diwujudkan agar kebutuhan untuk mengatasi ketimpangan pasca pandemi dapat diminimalisir.

DAMPAK TKDD TERHADAP KEMISKINAN

01 | Latar Belakang

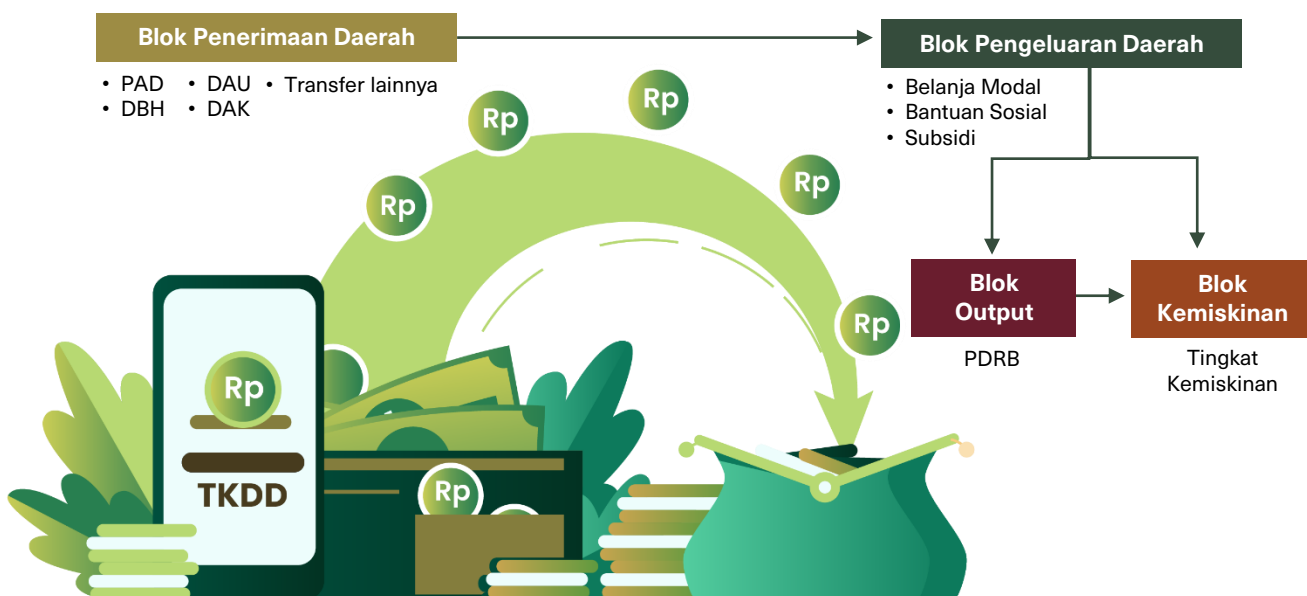
Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator maupun permasalahan lain yang melingkupinya. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari dimensi ekonomi tapi juga dari dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Pemerintah menggunakan instrumen APBN untuk menurunkan tingkat kemiskinan melalui berbagai program yang diarahkan pada pro growth, pro job dan pro poor. Berkaitan dengan daerah, instrumen APBN dalam menyokong pembangunan di daerah berupa Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dengan kenaikan TKDD yang signifikan dari tahun ke tahun, diharapkan dapat berdampak pada pencapaian target nasional melalui proses pembangunan di daerah. Salah satu target tersebut adalah penurunan tingkat kemiskinan.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui dampak Transfer ke Daerah terhadap penurunan kemiskinan, membentuk sebuah model ekonometri yang dapat mengukur dampak Transfer ke Daerah terhadap penurunan kemiskinan serta diharapkan dapat menjadi salah satu masukan dalam penyusunan kebijakan Transfer ke Daerah. Adapun analisis dalam kajian ini terbagi atas 3 model yaitu model nasional, model Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan model Kawasan Timur Indonesia (KTI).

02 | Metodologi

Analisis ini menggunakan pendekatan penelitian melalui beberapa transmisi. Saluran pertama Transfer ke Daerah dan Dana Desa seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Transfer Lainnya akan masuk pada sisi pendapatan dalam APBD yang mana akan digunakan Pemerintah Daerah untuk belanja. Transmisi kedua dilihat dari aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan transfer ke daerah dan dana desa diharapkan memberikan kontribusi terhadap PDRB. Selanjutnya dari PDRB akan mempengaruhi penurunan kemiskinan. Alur transmisi model tersebut dapat digambarkan sebagai berikut

Transmisi antar Blok Persamaan



03 Hasil Kajian dan Rekomendasi

Hasil Kajian

Secara umum DBH merupakan jenis transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang paling konsisten dalam mendorong peningkatan belanja modal yang selanjutnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan hanya terjadi secara Nasional dan Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pada Kawasan Barat Indonesia, TKDD khususnya DBH dan Transfer lainnya hanya mampu berdampak pada pertumbuhan ekonomi tanpa memiliki dampak lanjutan terhadap pengurangan kemiskinan.

DAK merupakan dana transfer yang paling efektif dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan baik secara nasional maupun pada KTI.

Belanja bantuan sosial yang diharapkan mampu mengurangi tingkat kemiskinan justru malah berdampak pada positif terhadap kemiskinan.

Rekomendasi

Perlu mempertimbangkan peningkatan dana transfer melalui DBH atau DAK dibandingkan dengan dana transfer yang lain dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

Perlu melakukan eksplorasi model transmisi TKDD yang bisa berdampak pada pengurangan kemiskinan khususnya untuk wilayah KBI.

Kebijakan pengalokasian dana transfer perlu mempertimbangkan konteks kewilayahan dan sasaran outcome yang akan dicapai. Pada KTI, DAK sebaiknya lebih diprioritaskan dibandingkan yang lainnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan.

Perlunya perubahan skema belanja bantuan sosial di daerah dengan memasukkannya sebagai bagian dari belanja program sehingga target penggunaannya lebih riil.

Penulis : Tim Kajian DJPK

KABAR DAERAH

01

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berusaha mencegah lambatnya laju perekonomian akibat pandemi Covid-19, terutama yang berdampak pada kemiskinan di sektor nelayan, perkebunan dan kehutanan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan melalui program penanggulangan kemiskinan. Program tersebut meliputi bantuan sosial berbasis individu dan keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) Plus atau Program Bantuan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (BSPD). Selain itu, Pemprov Jatim juga membantu kelancaran pemasaran dan distribusi produk pertanian serta perikanan. Bantuan untuk petani dan nelayan meliputi restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha dan petani, menyediakan jaring pengaman sosial, juga memfasilitasi kegiatan crash program padat karya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk petani dan nelayan. Di samping itu, Pemprov Jatim juga tengah menerapkan program pengembangan UMKM untuk menjadi bagian penting dalam mengatasi ketimpangan pendapatan karena sektor UMKM menjadi backbone perekonomian Jawa Timur di masa pandemi Covid-19.

<https://radarsurabaya.jawapos.com/>

02

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menekan angka kemiskinan. Pada ulang tahun ke-494 Kota Jakarta, Pemprov DKI berkomitmen untuk menjadikan DKI Jakarta zero kemiskinan. Saat ini DKI Jakarta termasuk provinsi dengan angka kemiskinan terendah di seluruh Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan Jakarta pada September 2019 sebesar 3,42 persen dan pada September 2020 ketika pandemi Covid-19 sebesar 4,69 persen. Pada 2019, DKI Jakarta berada di urutan pertama provinsi dengan angka kemiskinan terendah dan pada 2020 berada di urutan kedua terendah setelah Bali (tingkat kemiskinan 4,45 persen). Menurut Pemprov DKI Jakarta, salah satu tantangan terberat saat ini untuk mengentaskan angka kemiskinan adalah pandemi Covid-19 yang terus melonjak secara drastis. Lonjakan kasus Covid-19 ini membuat kebijakan pemulihan ekonomi Jakarta terganggu. Selain pandemi Covid-19, tantangan lain adalah alokasi sumber daya ekonomi yang masih terpusat pada satu atau dua kelompok atau entitas sehingga perlu intervensi kebijakan Pemprov DKI untuk membuat alokasi sumber daya ekonomi bisa merata dan menjadi efisien bagi seluruh warga Jakarta.

03

Jumlah warga kurang mampu di Kabupaten Tanah Datar masih tergolong tinggi. Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akhir Desember 2020, di Tanah Datar terdapat 32.000 rumah tangga atau 33.000 Kepala Keluarga (KK) kurang mampu. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai program pengentasan kemiskinan terus dilakukan oleh Pemkab Tanah Datar melalui program pusat maupun program daerah. Salah satu keberhasilan program pengentasan kemiskinan itu, di antaranya berkurangnya penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Dari 17.000 lebih penerima PKH sebelumnya, saat ini sudah jauh berkurang menjadi 14.075 penerima. Tahun 2021 ini, kucuran dana untuk PKH di Tanah Datar tersedia sebesar Rp54 M, yang akan disalurkan kepada 14.075 KK. Masih terdapatnya warga kurang mampu di Tanah Datar disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari kurangnya lapangan pekerjaan, hingga lilitan utang kepada rentenir. Pemkab Tanah Datar terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Tanah Datar melalui program-program yang disusun harus realistis dan jelas sehingga tangga demi tangga tahapan pengentasan kemiskinan bisa dicapai.

<https://padangkita.com/>

04

Pandemi yang berdampak peningkatan kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Buleleng pada 2020 lalu, sudah dijawab dengan sejumlah program oleh Pemkab Buleleng. Banyak program yang dikururkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten secara bersama-sama untuk mengatasi dampak pandemi ini, mulai dari program bantuan sosial hingga program pemberdayaan masyarakat. Pemkab Buleleng telah berupaya maksimal dalam pengentasan kemiskinan yang kembali meningkat 0,13 persen dari 2019 ke 2020. Penanganan dampak ekonomi pada masa pandemi diawali dengan realokasi anggaran dan refocusing kegiatan di organisasi perangkat daerah (OPD) maupun melalui pemanfaatan belanja tak terduga (BTT). Pemkab Buleleng juga mengupayakan penciptaan iklim usaha kecil menengah, pengembangan kewirausahaan untuk mengatasi tingkat pengangguran terbuka di 2020 lalu. Pengendalian tingkat inflasi daerah dilakukan dengan berbagai inovasi program, mulai dari stimulan usaha kepada lumbung pangan mandiri dengan bantuan bibit tanaman dengan sasaran rumah tangga, pemanfaatan, dan konsumsi beras dan buah lokal untuk perputaran ekonomi daerah hingga operasi pasar murah yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Buleleng.

<https://www.nusabali.com/>

05

Kemiskinan menjadi masalah serius di Kabupaten Brebes. Terlebih di tengah pandemi COVID-19, jumlah angka kemiskinan meningkat. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Brebes menjalankan program Pemprov Jawa Tengah terkait percepatan penurunan angka kemiskinan, yaitu Gerakan Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan Menuju Desa Lebih Sejahtera. Memang Pemkab Brebes mengalami refocusing anggaran, yang sebagian digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Namun masalah pengentasan kemiskinan tetap jadi prioritas dan tetap dijalankan. Menurut data Pemkab Brebes, angka kemiskinan di Kabupaten Brebes meningkat yang semula hanya 36 desa miskin, kini menjadi 43 desa miskin dari total 292 desa yang tersebar di 17 kecamatan. Selain itu, dana desa juga bisa dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan dengan syarat setiap OPD melaporkan proses maupun hasil program di desa dampingan. Sementara itu, gerakan satu OPD satu desa dampingan merupakan implementasi program pemerintah provinsi dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan.

<https://panturapost.com/>

06

Masyarakat suku Korowai yang tinggal di wilayah Korowai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, sudah terisolasi selama bertahun-tahun akibat tidak adanya akses transportasi yang memadai, untuk menuju ke lokasi tersebut bisa dibilang tidaklah mudah. Untuk mencapai lokasi itu, warga hanya diberikan dua pilihan moda transportasi, yaitu menggunakan helikopter atau longboat. Jika memanfaatkan helikopter, jarak tempuh dari Boven Digoel sekitar satu jam. Namun jika menggunakan longboat, membutuhkan waktu satu hari perjalanan dan ditambah dua hari berjalan kaki. Salah satu pemilik Dusun Kali Dairam Korowai mengatakan, meski tidak pernah tersentuh pembangunan pemerintah, namun masyarakatnya masih beruntung karena ada tambang emas rakyat yang bisa dimanfaatkan. Karena lokasinya terisolasi dan jauh dari perkotaan itu harga kebutuhan pokok di Korowai cukup tinggi. Bahkan untuk harga satu karung beras berukuran 10 kilogram di kawasan tambang rakyat Korowai mencapai Rp 2 juta. Tak hanya beras, untuk satu kardus mi instan dijual seharga Rp 1 juta. Sedangkan ikan kaleng seharga Rp 150 ribu.

<https://regional.kompas.com>

